

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kecenderungan kecurangan akuntansi dalam dunia usaha adalah suatu permasalahan yang tidak akan pernah habisnya untuk dibicarakan dan telah menarik banyak perhatian media dan telah berkembang di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Kecurangan merupakan bentuk penipuan yang sengaja dilakukan sehingga dapat menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan (Wiloppo, 2006). Kecurangan umumnya terjadi karena tekanan untuk melakukan penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada (Rahmawati, 2012). Pada umumnya, kecurangan akuntansi berkaitan erat dengan korupsi.

Dalam korupsi tindakan yang lazim dilakukan diantaranya adalah memanipulasi pencatatan, penghilangan dokumen, dan *mark-up* yang merugikan keuangan atau perekonomian perusahaan. Terdapat opini bahwa kecurangan akuntansi dapat dikatakan sebagai tendensi korupsi dalam definisi dan terminologi karena keterlibatan beberapa unsur yang terdiri dari pengungkapan fakta-fakta menyesatkan, pelanggaran aturan atau penyalahgunaan kepercayaan, dan komisi fakta kritis (Kusumastuti, 2012).

Pada dasarnya ada dua tipe kecurangan yang terjadi di suatu instansi ataupun perusahaan, yaitu eksternal dan internal. Kecurangan eksternal yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pihak luar terhadap perusahaan dan kecurangan internal adalah tindakan tidak legal dari karyawan, manajer dan

eksekutif terhadap perusahaan (Widajaja, 2013 dalam Triasmara, 2014). Kecurangan akuntansi (*fraud*) yang menjadi salah satu cikal bakal munculnya tindak pidana korupsi. Korupsi adalah tindakan seorang pejabat atau petugas yang tidak secara sah dan tidak benar, memanfaatkan pekerjaannya atau karakternya untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau untuk orang lain, dengan melanggar kewajiban dan hak orang lain (Singleton, 2007 dalam Triasmara, 2014).

Dampak dan konsekuensi yang ditimbulkan oleh kecenderungan kecurangan akuntansi tidak dapat dihindarkan, baik untuk perusahaan maupun negara. Perusahaan akan mengalami kerugian yang signifikan karena hal tersebut. Kecurangan akuntansi secara luas terjadi di Amerika Serikat. Hal tersebut terbukti dengan terbongkarnya kasus skandal keuangan perusahaan-perusahaan besar di Amerika seperti Enron, Xerox, dan Global Crossing (Che We. 2004 dalam Wiloppo, 2006). Lebih lanjut Bestivano (2013) menyebutkan bahwa perusahaan yang terlibat dengan manipulasi dalam praktik akuntansi adalah Waste Management, World Com, Enron, dan Merck Corp.

Beberapa kasus manipulasi dalam praktik akuntansi telah terjadi juga di beberapa perusahaan di Indonesia seperti diantaranya kasus pada PT. Kimia Farma Tbk dan PT. Bank Lippo Tbk. (Puwandari, 2011). Untuk lebih jelasnya, keterangan kasus-kasus ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1: Kasus Manipulasi Akuntansi Pada Perusahaan di Luar Negeri dan di Indonesia

| PERUSAHAAN | KASUS |
|------------------|--|
| Waste Management | Praktik akuntansi yang agresif menyebabkan laba sebelum pajak membengkak sebesar \$1.43 miliar dan beban pajak kerendahan \$178 juta antara tahun 1992 dan 1996 |
| Enron | Sejumlah eksekutif Enron melakukan manipulasi pembukuan melalui Arthur Anderson yang menyebabkan laba Enron terdongkrak US\$ 1 milyar untuk menyesatkan para investornya. |
| World Com | Mengakui telah menggelembungkan keuntungan sebesar US\$ 3,85 milyar antara periode Juni 2001 sampai dengan Maret 2002. Hal itu dilakukan dengan memanipulasi pembukuan dimana angka tersebut pura-pura dimasukkan dalam pos investasi yang seharusnya merupakan biaya operasi normal. Akibatnya pos keuntungan seolah-olah sangat besar, sehingga harga sahamnya juga meningkat. |
| Merck Corp | Merck Corp pun sempat terbukti membukukan biaya pendapatan fiktif senilai US\$ 12,4 milyar. |
| PT. Kimia Farma | Pada PT. Kimia Farma Tbk, perusahaan ini diperkirakan melakukan <i>mark up</i> laba bersih dalam laporan keuangan tahun 2001 sebesar Rp. 32,7 miliar. |
| PT. Bank Lippo | PT. Bank Lippo Tbk melakukan skandal dengan menerbitkan 3 laporan keuangan yang berbeda yakni laporan keuangan yang dipublikasikan kepada media massa, Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal), dan laporan keuangan yang disampaikan akuntan publik kepada manajer perusahaan. |

Sumber: Data Olahan, 2016

Kasus manipulasi akuntansi lainnya yang terjadi pada perusahaan di Indonesia adalah kasus bank Permata yaitu pada tahun 2013 adanya kasus dugaan korupsi senilai kurang lebih Rp. 6 Miliar yang diantara dua tersangka yang telah ditetapkan salah satunya adalah mantan kepala cabang Bank Permata Kenari Jakarta pusat (news.kompas.com; 2013) dalam (Puteri, 2015) dan pada akhir tahun 2014 sedang terlibat kasus pembobolan rekening nasabahnya melalui layanan Permata Net senilai Rp. 245 juta (republika.co.id; 2015) dalam (Puteri, 2015). Selain itu ditahun 2014 terjadi kasus Bank Mandiri Syariah, terdapat beberapa kasus dimana terjadi pembobolan yang melibatkan karyawan pada masing-masing bank tersebut seperti pembobolan dana senilai Rp. 75

Miliar di Bank Mandiri Syariah pada bulan February 2014 (Tribunnews.com; 2014) dalam (Puteri, 2015), dan pembobolan dana senilai Rp. 22,4 Miliar di Bank CIMB Niaga pada bulan Oktober 2014 (metrotvnews.com;2014) dalam (Puteri, 2015).

Kasus lainnya adalah terjadi pada BUMN yaitu salah satu kecurangan yang terjadi adalah hasil audit subsidi listrik tahun 2012 yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya selisih perhitungan subsidi sebesar Rp. 6,7 triliun, menanggapi hal itu, PLN membantah telah melakukan kecurangan dalam perhitungan anggaran subsidi listrik. Koreksi perhitungan subsidi listrik tahun 2012 oleh badan pemeriksa keuangan (BPK) sebesar Rp. 6,7 triliun terjadi karena adanya sedikit perbedaan dalam menterjemahkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dalam perhitungan subsidi listrik antara PLN dan BPK. Perbedaan inilah yang menyebabkan adanya koreksi dalam perhitungan subsidi listrik (Rahayu, 2014).

Kasus manipulasi akuntansi atau kecurangan akuntansi di Indonesia tidak hanya terjadi pada perusahaan besar dan BUMN sebagaimana dijelaskan sebelumnya namun terjadi pula pada instansi pemerintah. Sebagaimana dalam laporan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) terdapat tiga besar sektor yang paling merugikan negara akibat korupsi, pertama, sektor investasi pemerintah dengan potensi kerugian negara mencapai Rp. 439 Miliar. Kedua sektor keuangan daerah dengan potensi kerugian negara mencapai Rp. 417, 4 Miliar. Ketiga, sektor sosial kemasyarakatan, yakni korupsi yang kasusnya berkaitan dengan dana-dana bantuan yang diperuntukkan bagi masyarakat, yang diperkirakan mencapai Rp.299 Miliar (Zulkarnain, 2013).

Kasus kecurangan akuntansi ataupun praktik akuntansi yang tidak baik yang terjadi di instansi pemerintah diantaranya kasus yang menyangkut Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Surakarta, tentang kasus dugaan korupsi dalam proyek pengadaan taman. Satyo Teguh diduga melakukan korupsi dana APBD 2010 yang digunakan untuk pengadaan taman, selain itu dugaan korupsi Sistem Informasi Pemerintahan Desa di Cilacap senilai Rp. 6,8 Miliar yang dengan tersangka mantan Bupati Cilacap Probo Yulastoro, serta kasus dugaan korupsi pengadaan Buku Wajib Balai Pustaka APBD 2003 kota Surakarta senilai Rp. 3,7 Miliar dengan tersangka mantan Walikota Surakarta, Slamet Suryanto (Zulkarnain, 2013).

Banyaknya kasus kecurangan akuntansi yang terjadi menunjukkan bahwa kecurangan akuntansi masih tinggi baik di luar negara Indonesia maupun dalam negara Indonesia. Kasus kecurangan akuntansi terjadi tidak hanya pada perusahaan besar tetapi terjadi pula di instansi pemerintah. Kasus-kasus tersebut berdampak pada melemahnya kepercayaan publik kepada perusahaan dan instansi pemerintah.

Kecurangan akan dilakukan jika ada kesempatan dimana seseorang harus memiliki akses terhadap aset atau memiliki wewenang untuk mengatur prosedur pengendalian yang memperkenankan dilakukannya skema kecurangan (Kusumastuti, 2012). Jabatan, tanggung jawab, maupun otorisasi memberikan peluang untuk terlaksananya kecurangan (Aranta, 2013). Douglas dan Wier (2000) dalam Arthaswadaya (2015) yang menyatakan bahwa manajer akan memanfaatkan asimetri informasi untuk melakukan kecurangan akuntansi jika terdapat insentif. Keberadaan asimetri informasi dianggap sebagai penyebab Kecurangan Akuntansi (Aranta, 2013). Semakin banyak informasi tentang

internal suatu perusahaan yang dimiliki *agent* dari pada *principal* maka peluang bagi *agent* untuk melakukan kecurangan.

Menurut Fatun (2013) dalam Giarini (2015), asimetri informasi merupakan keadaan dimana pihak dalam perusahaan mengetahui informasi yang lebih baik dibanding pihak luar perusahaan (*stakeholders*). Jika terjadi kesenjangan informasi antara pihak pengguna dan pihak pengelola, maka akan membuka peluang bagi pihak pengelola dana untuk melakukan kecurangan.

Asimetri informasi pada suatu instansi adalah atasan/pemegang kuasa anggaran mungkin mempunyai pengetahuan yang lebih dari pada bawahan/pelaksana anggaran mengenai unit tanggung jawab bawahan/pelaksana anggaran, ataupun sebaliknya. Asimetri informasi yang timbul dalam penyusunan anggaran daerah dapat mengakibatkan permasalahan-permasalahan seperti salah saji material dengan sengaja (Dewi, 2014).

Asimetri informasi terjadi karena legislatif tidak memiliki informasi yang mencukupi mengenai kinerja eksekutif, legislatif tidak pernah dapat merasa pasti bagaimana usaha eksekutif memberikan kontribusi pada hasil aktual pada suatu organisasi pemerintahan (Aranta, 2013). Schiff dan Lewin (1970) dalam Aranta (2013) mengatakan apabila atasan mengizinkan bawahan untuk berpartisipasi dalam penetapan anggaran, dapat digunakan sebagai alat untuk menjaring informasi privat yang dimiliki bawahan. Dalam sektor publik asimetri informasi terjadi antara anggota legislatif (DPRD) dengan Pemerintah.

Hal ini juga terjadi di pemerintahan disaat proses penyusunan anggaran pemerintah daerah, proses anggaran pemerintah dimulai dari penyusunan anggaran, pelaksana dan pelaporan. Penyusunan anggaran merupakan tahap penyusunan program yang dilakukan oleh masing-masing Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) dan dibahas oleh Panitia Anggaran Legislatif dengan Tim Anggaran Eksekutif. Pelaksanaan anggaran merupakan tahapan yang dimulai sejak APBD disahkan, pelaksana ini secara penuh menjadi tanggungjawab eksekutif. Laporan pertanggungjawaban merupakan laporan atas pelaksana APBD, dalam tahap ini dilakukan pemeriksaan oleh auditor internal yaitu BAWASDA (Badan Pengawasan Daerah) dan auditor eksternal yaitu BPK. Dari proses anggaran pemerintah tersebut, poses penyusunan anggaran merupakan proses yang terdapat asimetri informasi dalam kaitannya hubungan antara eksekutif selaku agen dan legislatif selaku prinsipal (Dewi 2014).

Sebagai contoh bentuk dari kecenderungan kecurangan akuntansi yang ditemui BPK setelah melakukan audit atas laporan keuangan Pemerintah Kota Gorontalo adalah kebocoran anggaran, contohnya, kasus yang terjadi pada penyimpangan anggaran dana palang merah indonesia dan bantuan sosial kota gorontalo yang melibatkan wakil wali kota Gorontalo dijerat kasus dugaan korupsi dana PMI sebesar Rp. 3,4 Miliar (Prasetyo, 2012), selain itu korupsi pengadaan Al-quran dan buku iqra yang melibatkan sekretaris daerah (Sekda) Kota Gorontalo untuk periode 2007- 2008 dengan total kerugian akibat korupsi tersebut mencapai Rp. 137 Juta (Billiocta, 2013), penyimpangan anggaran daerah (APBD) tahun 2008 di Dinas PU Kabupaten Bone Bolango sebesar Rp. 19,5 Miliar yang melibatkan 13 tersangka (infokorupsi.com 2011), penyimpangan Dana Alokasi Khusus Tahun 2008 di Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bone Bolango senilai Rp. 16 Miliar yang melibatkan mantan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bone Bolango (infokorupsi.com 2010) dan korupsi surat perintah perjalanan dinas (SPPD) fiktif pada tahun 2008 yang melibatkan Sekertaris (DPRD) Kota Gorontalo dengan memalsukan tanda tangan

dan stempel perjalanan dinas anggota DPRD Kota Gorontalo sehingga jumlah kerugian negara akibat kasus korupsi tersebut sebesar Rp. 5,3 Miliar (Madjowa, 2005).

Berdasarkan fakta di atas, dapat dilihat bahwa kecurangan sangat merugikan keuangan daerah. Hal ini terjadi akibat tingkah salah seorang aparat atau sekumpulan aparat yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Terkadang hal itu terjadi karena ketidakseimbangan dalam memperoleh informasi antara pihak penyedia informasi dengan pihak pengguna informasi sehingga ketidakselarasan informasi antara yang memberi perintah dengan orang yang menjalankan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang mengakibatkan kerugian aset daerah.

Penelitian mengenai asimetri informasi pengaruhnya terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi telah banyak diteliti oleh penelitian sebelumnya. Diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Kusumastuti (2012) dengan melihat analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dengan perilaku tidak etis sebagai variabel intervening pada Bank Umum di Kota Semarang tahun 2012. Hasil penelitian membuktikan bahwa diantaranya adalah asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Disamping itu, Aranta (2013) dalam penelitiannya pengaruh moralitas aparat dan asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi studi empiris Pemerintah Kota Sawahlunto, menunjukkan bahwa asimetri informasi berpengaruh signifikan positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Namun kedua hasil penelitian di atas, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Giarini (2015), dengan melihat pengaruh efektifitas

pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, dan asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi studi empiris pada Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan hasil penelitian bahwa asimetri informasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dengan faktor asimetri informasi yang mempengaruhinya. Penelitian ini dilakukan dengan menggali persepsi penanggungjawab penyusun laporan keuangan pada Pemerintah Kota Gorontalo untuk mengetahui ada tidaknya kecurangan akuntansi pada lingkup instansi tersebut dengan faktor asimetri informasi yang mempengaruhinya.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH ASIMETRI INFORMASI TERHADAP KECENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI PADA PEMERINTAH KOTA GORONTALO”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Instansi Pemerintahan cenderung melakukan kecurangan akuntansi, hal ini dibuktikan dalam Penelitian Aranta (2013) tentang kecenderungan kecurangan akuntansi pada instansi pemerintah.
2. Semakin banyak informasi yang diperoleh bawahan/ pelaksana anggaran dari pada atasan/pemegang kuasa anggaran tentang proses penyusunan,

pelaksana, sampai pelaporan anggaran maka memberikan kesempatan kepada bawahan menggunakan informasi yang diketahuinya untuk memanipulasi pelaporan keuangan sebagai usaha untuk memaksimalkan kemakmurannya.

3. Ketidaksielarasan Informasi yang di berikan bawahan kepada atasan sering memicu adanya hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat merugikan aset daerah.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah asimetri informasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Pemerintah Kota Gorontalo?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Pemerintah Kota Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan sebagai pengembangan ilmu di bidang akuntansi, khususnya akuntansi keuangan terkait dengan teori atribusi.

Disamping itu hasil penelitian ini diharapkan juga sebagai referensi untuk penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah kota gorontalo untuk menjaga hal-hal yang berkaitan dengan asimetri informasi, sebaiknya pemerintah Kota Gorontalo memperketat pengawasan serta fungsi dari Inspektorat terutama dalam hal maksimalisasi pengendalian internal pemerintahan.